



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348, Faksimile. (021) 3453553  
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110 [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id)

Nomor : 16292 /SEK/OT1.6/11/2025 Jakarta, 25 November 2025  
Sifat : Terbatas  
Lampiran : Empat Berkas  
Hal : Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP

Yth. 1. Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI:  
2. Para Kepala/Ketua Pengadilan Tingkat Banding;  
3. Para Kepala/Ketua Pengadilan Tingkat Pertama;  
Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya

Menindaklanjuti Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 167/KMA/SK. RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 – 2029, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/SK. RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/ SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 – 2029, seluruh unit Eselon I, Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya wajib menyusun dokumen SAKIP yang terdiri dari:

1. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU).
2. Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi unit kerja yang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Tahun 2025.
3. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029.
4. Revisi Rencana Strategis bagi unit kerja yang telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029.
5. Revisi Rencana Kinerja Tahun 2026;
6. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
7. Revisi Rencana Aksi Tahun 2025;
8. Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi Triwulan I - III Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
9. Revisi Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi Triwulan I - IV Tahun 2025 berdasarkan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
10. Rencana Kinerja Tahun 2027;

11. Perjanjian Kinerja Tahun 2026;
12. Rencana Aksi Tahun 2026;
13. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024;
14. Laporan Kinerja Tahun 2025 dengan ketentuan: masing-masing Entitas Akuntabilitas Kinerja
  - a) Memuat pernyataan telah direviu pada halaman paling awal sebelum Kata Pengantar dan Formulir Reviu Laporan Kinerja menjadi Lampiran dalam Laporan Kinerja Tahun 2025
  - b) BAB II Perencanaan Kinerja pada Subbab Perjanjian Kinerja perlu disampaikan:
    - Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebelum terjadi revisi disertai dengan capaian kinerja akumulasi hingga September Tahun 2025.
    - Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
  - c) BAB III Akuntabilitas Kinerja pada Subbab Capaian Kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja perbulan mulai Januari hingga Desember atas sasaran, indikator, dan target pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Hasil pengukuran kinerja perbulan tersebut juga menjadi Lampiran dalam Laporan Kinerja Tahun 2025.
  - d) Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 dijelaskan pada BAB III.

Seluruh Dokumen SAKIP berikut dengan revisinya disampaikan paling lambat tanggal 28 Februari 2026 melalui:

1. Aplikasi e-SAKIP REVIU oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada link <https://esr.menpan.go.id/>.
2. Aplikasi e-SAKIP pada link <https://batara.mahkamahagung.go.id/>.
3. Website masing-masing Satuan Kerja.

Bila diperlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Rina Alprini (081310606347).

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

  
Sekretaris Mahkamah Agung RI  
Sugiyanto

Lampiran I : Surat Sekretaris Mahkamah Agung  
Nomor : 16292 /SEK/OT1.6/11/2025  
Tanggal : 25 November 2025

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN ..... (1) TRIWULAN I/III/III/IV  
.....(2)

| NO | SASARAN | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|---------|-----------|--------|-----------|---------|
| 1. | .....   | 1. ....   |        |           |         |
|    |         | 2. ....   |        |           |         |

| NO | AKSI/KEGIATAN | URAIAN PROGRES PELAKSANAAN | URAIAN PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT |
|----|---------------|----------------------------|---------------------|---------------|
|    |               |                            |                     |               |
|    |               |                            |                     |               |

| NO | SASARAN | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|---------|-----------|--------|-----------|---------|
| 2. | .....   | 1. ....   |        |           |         |
|    |         | 2. ....   |        |           |         |

| NO | AKSI/KEGIATAN | URAIAN PROGRES PELAKSANAAN | URAIAN PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT |
|----|---------------|----------------------------|---------------------|---------------|
|    |               |                            |                     |               |
|    |               |                            |                     |               |

..... (3) .....(4)

.....(5)

(.....)(6)

Petunjuk Pengisian:

- (1) Tahun Pelaksanaan Kinerja
- (2) Entitas Akuntabilitas Kinerja
  - Unit Eselon I
  - Pengadlian Tingkat Banding
  - Pengadlian Tingkat Pertama
- (3) Lokasi Penetapan
- (4) Tanggal, Bulan dan Tahun Penetapan
- (5) Pimpinan Entitas Akuntabilitas Kinerja
  - Kepala Unit Eselon I
  - Ketua Pengadlian Tingkat Banding
  - Ketua Pengadlian Tingkat Pertama
- (6) Nama Pimpinan Entitas Akuntabilitas Kinerja



Lampiran II: Surat Sekretaris Mahkamah Agung  
 Nomor : 16292 /SEK/OT1.6/11/2025  
 Tanggal : 25 November 2025

FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN ..... (1)

.....(2)

| No. | Pernyataan           |                                                                                                 | Check List |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.  | Format               | 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP                                      |            |
|     |                      | 2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja                                                |            |
|     |                      | 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai                                         |            |
|     |                      | 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan                 |            |
|     |                      | 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan                                                    |            |
|     |                      | 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan                                                      |            |
| 2.  | Mekanisme penyusunan | 1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu                          |            |
|     |                      | 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai                 |            |
|     |                      | 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj |            |
|     |                      | 4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja            |            |
|     |                      | 5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya                |            |
|     |                      | 6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait                        |            |
|     |                      | 7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.                               |            |
| 3.  | Substansi            | 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja         |            |

|  |  |                                                                                                                |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis                                             |  |
|  |  | 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai                                  |  |
|  |  | 4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja                         |  |
|  |  | 5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama                   |  |
|  |  | 6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai                                  |  |
|  |  | 7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat |  |
|  |  | 8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran                                                              |  |
|  |  | 9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai                                                         |  |
|  |  | 10. IKU dan IK telah SMART                                                                                     |  |

..... (3), .....(4)

Pereviu I

Pereviu II

(.....)

(.....)(5)

---

**Petunjuk Pengisian:**

- (1) Tahun Pelaksanaan Kinerja
- (2) Entitas Akuntabilitas Kinerja
  - Unit Eselon I
  - Pengadilan Tingkat Banding
  - Pengadilan Tingkat Pertama
- (3) Lokasi Penetapan
- (4) Tanggal, Bulan dan Tahun Penetapan
- (5) Nama Pereviu

Lampiran III : Surat Sekretaris Mahkamah Agung  
Nomor : 16292 /SEK/OT1.6/11/2025  
Tanggal : 25 November 2025

PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN ..... (1)  
.....(2)

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada ..... (2)  
untuk Tahun Anggaran .....(1) sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja.  
Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab  
manajemen ..... (2).

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah  
disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan  
perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan  
kinerja ini.

..... (3), .....(4)

Pereviu I

Pereviu II

(.....)

(.....)(5)

---

Petunjuk Pengisian:

- (1) Tahun Pelaksanaan Kinerja
- (2) Entitas Akuntabilitas Kinerja
  - Unit Eselon I
  - Pengadilan Tingkat Banding
  - Pengadilan Tingkat Pertama
- (3) Lokasi Penetapan
- (4) Tanggal, Bulan dan Tahun Penetapan
- (5) Nama Pereviu

Lampiran IV : Surat Sekretaris Mahkamah Agung  
Nomor : 16292 /SEK/OT1.6/11/2025  
Tanggal : 25 November 2025

MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ..... (1)  
.....(2)

| No | Rekomendasi LHE<br>Tahun ..... (1) | Permasalahan | Rencana Aksi<br>Tindak Lanjut | Target | Waktu<br>Pelaksanaan | Penanggung<br>Jawab | Status/Progres<br>Penyelesaian | Link Bukti<br>Dukung |
|----|------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|
|    |                                    |              |                               |        |                      |                     |                                |                      |

..... (3) .....(4)

.....(5)

(.....)(6)

Petunjuk Pengisian:

- (1) Tahun LHE
- (2) Entitas Akuntabilitas Kinerja
- (3) Lokasi Penetapan
- (4) Tanggal, Bulan dan Tahun Penetapan
- (5) Pimpinan Entitas Akuntabilitas Kinerja
- (6) Nama Pimpinan Entitas Akuntabilitas Kinerja

# **REVISI RENCANA AKSI TAHUN 2025** **MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

| No | Sasaran Strategis                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                       | Target  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1  | Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern | 1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu                                                                                                   | 96,46%  |
|    |                                                                                 | 2. Persentase pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju                                          | 100,00% |
|    |                                                                                 | 3. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak                                       | 99,97%  |
|    |                                                                                 | 4. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak | 91,01%  |
|    |                                                                                 | 5. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak            | 90,69%  |
|    |                                                                                 | 6. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan                                                                                   | 90,11%  |
|    |                                                                                 | 7. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata                                                                                          | 39,55%  |
|    |                                                                                 | 8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif                                                                 | 10,48%  |
|    |                                                                                 | 9. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi                                                                                        | 18,69%  |
|    |                                                                                 | 10. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi                                                                                  | 97,00&  |
|    |                                                                                 | 11. Persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court                                                             | 95,76%  |
|    |                                                                                 | 12. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)                                                                            | 89,80%  |
|    |                                                                                 | 13. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)                                                                       | 89,93%  |

## **1. KEPANITERAAN**

| NO | AKSI/KEGIATAN                                                | JADWAL PELAKSANAAN |    |     |    | KELUARAN | PROGRAM                               | KEGIATAN                              | DANA          |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------|----|-----|----|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
|    |                                                              | I                  | II | III | IV |          |                                       |                                       |               |
| 1. | Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung |                    |    |     |    | Kegiatan | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1044-Peningkatan Penyelesaian Perkara | Rp250.000.000 |



|    |                                                              |  |  |  |  |         |                                       |                                       |                  |
|----|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 2. | Putusan Perkara Pidana                                       |  |  |  |  | Perkara | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1044-Peningkatan Penyelesaian Perkara | Rp10.218.452.000 |
| 3. | Putusan Perkara Pidana Militer                               |  |  |  |  | Perkara | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1044-Peningkatan Penyelesaian Perkara | Rp308.124.000    |
| 4. | Penyelesaian Perkara PHI yang nilai gugatannya dibawah 150jt |  |  |  |  | Perkara | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1044-Peningkatan Penyelesaian Perkara | Rp633.461.000    |

## 2. BADAN PERADILAN UMUM

| NO | AKSI/KEGIATAN                                                                | JADWAL PELAKSANAAN |    |     |    | KELUARAN | PROGRAM                               | KEGIATAN                                         | DANA             |
|----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|-----|----|----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
|    |                                                                              | I                  | II | III | IV |          |                                       |                                                  |                  |
| 1. | Bimbingan Teknis tentang Perempuan yang berhadapan dengan Hukum              |                    |    |     |    | Orang    | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1046 - Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum | Rp1.226.675.000  |
| 2. | Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum      |                    |    |     |    | Kegiatan | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum        | Rp850.000.000    |
| 3. | Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara    |                    |    |     |    | Perkara  | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum        | Rp360.000.000    |
| 4. | Sidang di luar Gedung Pengadilan                                             |                    |    |     |    | Perkara  | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum        | Rp8152.000.000   |
| 5. | Perkara Pidana Yang Diselesaikan di Tingkat Banding di wilayah Barat         |                    |    |     |    | Perkara  | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum        | Rp2.174.359.000  |
| 6. | Perkara Pidana Korupsi Yang Diselesaikan di Tingkat Banding di wilayah Barat |                    |    |     |    | Perkara  | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum        | Rp450.833.000    |
| 7. | Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat          |                    |    |     |    | Perkara  | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum        | Rp31.892.677.000 |



|     |                                                                                       |  |  |  |  |  |         |                                       |                                           |                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| 8.  | Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Barat           |  |  |  |  |  | Perkara | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Rp990.489.000    |
| 9.  | Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di wilayah Barat  |  |  |  |  |  | Perkara | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Rp1.676.867.000  |
| 10. | Perkara Pidana Yang Diselesaikan di Tingkat Banding di wilayah Tengah                 |  |  |  |  |  | Perkara | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Rp1.153.264.000  |
| 11. | Perkara Pidana Korupsi Yang Diselesaikan di Tingkat Banding di wilayah Tengah         |  |  |  |  |  | Perkara | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Rp266.473.000    |
| 12. | Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Tengah                  |  |  |  |  |  | Perkara | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Rp11.831.801.000 |
| 13. | Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah          |  |  |  |  |  | Perkara | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Rp537.180.000    |
| 14. | Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di wilayah Tengah |  |  |  |  |  | Perkara | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Rp386.751.000    |
| 15. | Perkara Pidana Yang Diselesaikan di Tingkat Banding di wilayah Timur                  |  |  |  |  |  | Perkara | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Rp191.488.000    |
| 16. | Perkara Pidana Korupsi Yang Diselesaikan di Tingkat Banding di wilayah Timur          |  |  |  |  |  | Perkara | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Rp110.457.000    |
| 17. | Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Timur                   |  |  |  |  |  | Perkara | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Rp1.461.773.000  |
| 18. | Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Timur           |  |  |  |  |  | Perkara | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Rp179.985.000    |



|     |                                                                                      |  |  |  |  |  |         |                                       |                                           |              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| 19. | Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di wilayah Timur |  |  |  |  |  | Perkara | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Rp91.748.000 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|

### 3. BADAN PERADILAN AGAMA

| NO | AKSI/KEGIATAN                                                                            | JADWAL PELAKSANAAN |    |     |    | KELUARAN | PROGRAM                               | KEGIATAN                                          | DANA             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|-----|----|----------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|
|    |                                                                                          | I                  | II | III | IV |          |                                       |                                                   |                  |
| 1. | Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama                 |                    |    |     |    | kegiatan | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1053-Peningkatan Manajemen Peradilan Agama        | Rp850.000.000    |
| 2. | Layanan Mediator Eksternal di Pengadilan                                                 |                    |    |     |    | Orang    | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1053-Peningkatan Manajemen Peradilan Agama        | Rp116.1000.000   |
| 3. | Penyelesaian Administrasi Perkara Jinayah                                                |                    |    |     |    | Perkara  | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1053-Peningkatan Manajemen Peradilan Agama        | Rp124.965.000    |
| 4. | Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara |                    |    |     |    | Perkara  | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1053-Peningkatan Manajemen Peradilan Agama        | Rp9.879.161.000  |
| 5. | Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung    |                    |    |     |    | Perkara  | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1053-Peningkatan Manajemen Peradilan Agama        | Rp20.882.166.000 |
| 6. | Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang terpadu           |                    |    |     |    | Perkara  | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1053-Peningkatan Manajemen Peradilan Agama        | Rp2.443.888.000  |
| 7. | Perkara yang diselesaikan melalui Sidang Itsbat Nikah diluar Negeri                      |                    |    |     |    | Perkara  | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1053-Peningkatan Manajemen Peradilan Agama        | Rp921.945.000    |
| 8. | Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum                                     |                    |    |     |    | Orang    | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 7019 - Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Agama | Rp841.387.000    |



#### 4. BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA

| NO | AKSI/KEGIATAN                                                                                                                       | JADWAL PELAKSANAAN |    |     |    | KELUARAN | PROGRAM                               | KEGIATAN                                     | DANA            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|-----|----|----------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
|    |                                                                                                                                     | I                  | II | III | IV |          |                                       |                                              |                 |
| 1. | Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer                                                          |                    |    |     |    | Kegiatan | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1058-Peningkatan Manajemen Peradilan Militer | Rp100.000.000   |
| 2. | Perkara Perbedaan Pendapat yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Utama                                                            |                    |    |     |    | Perkara  | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1058-Peningkatan Manajemen Peradilan Militer | Rp4.970.000     |
| 3. | Perkara Pidana Tingkat Banding yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Tinggi I s.d III                |                    |    |     |    | Perkara  | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1058-Peningkatan Manajemen Peradilan Militer | Rp172.200.000   |
| 4. | Perkara Pidana Tingkat Pertama yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi I s.d III dan Pengadilan Militer I - 01 s.d III - 18  |                    |    |     |    | Perkara  | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1058-Peningkatan Manajemen Peradilan Militer | Rp2.555.039.000 |
| 5. | Perkara Pidana Tingkat Pertama yang Diselesaikan di Pengadilan Militer III - 19 Jayapura                                            |                    |    |     |    | Perkara  | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1058-Peningkatan Manajemen Peradilan Militer | Rp512.485.000   |
| 6. | Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi I s.d III dan Pengadilan Militer I - 01 s.d III - 18 |                    |    |     |    | Perkara  | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1058-Peningkatan Manajemen Peradilan Militer | Rp34.866.000    |
| 7. | Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang Diselesaikan di Pengadilan Militer III - 19 Jayapura                                           |                    |    |     |    | Perkara  | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1058-Peningkatan Manajemen Peradilan Militer | Rp10.320.000    |
| 8. | Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Militer                                                 |                    |    |     |    | Perkara  | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1058-Peningkatan Manajemen Peradilan Militer | Rp2.663.253.000 |



|     |                                                                                              |  |  |  |  |  |          |                                       |                                                          |               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| 9.  | Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara         |  |  |  |  |  | Kegiatan | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1059 - Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara | Rp200.000.000 |
| 10. | Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara       |  |  |  |  |  | Perkara  | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1059 - Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara | Rp6.075.000   |
| 11. | Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara |  |  |  |  |  | Perkara  | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1059 - Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara | Rp760.190.000 |



# RENCANA AKSI TAHUN 2025

## MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

| No | Sasaran Strategis                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                           | Target                             |
|----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 2  | Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik | 1. Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN<br>2. Persentase Penanganan Pengaduan yang Tepat Waktu<br>3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti<br>4. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan | 98,00%<br>70,00%<br>85,00%<br>3,78 |

### 1. Badan Peradilan Umum

| NO | AKSI/KEGIATAN                                                                   | JADWAL PELAKSANAAN |    |     |    | KELUARAN | PROGRAM                               | KEGIATAN                                    | DANA             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|-----|----|----------|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
|    |                                                                                 | I                  | II | III | IV |          |                                       |                                             |                  |
| 1. | Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum    |                    |    |     |    | kegiatan | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1049 - Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Rp6.642.871.000  |
| 2. | Monitoring putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum |                    |    |     |    | kegiatan | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1049 - Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Rp5.760.000      |
| 3. | Bimbingan Teknis Percepatan Penyelesaian Perkara                                |                    |    |     |    | orang    | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1049 - Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Rp2.436.117.000  |
| 4. | Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum                          |                    |    |     |    | Orang    | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1049 - Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Rp13.136.800.000 |



## 2. BADAN PERADILAN AGAMA

| NO | AKSI/KEGIATAN                                               | JADWAL PELAKSANAAN |    |     |    | KELUARAN              | PROGRAM                               | KEGIATAN                                                                                       | DANA             |
|----|-------------------------------------------------------------|--------------------|----|-----|----|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |                                                             | I                  | II | III | IV |                       |                                       |                                                                                                |                  |
| 1. | Koordinasi dan Pemantauan Layanan Pengadilan Wilayah Barat  |                    |    |     |    | kegiatan              | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1053-Peningkatan Manajemen Peradilan Agama                                                     | Rp2.358.850.000  |
| 2. | Koordinasi dan Pembinaan Implementasi Restorative Justice   |                    |    |     |    | kegiatan              | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1053-Peningkatan Manajemen Peradilan Agama                                                     | Rp283.636.000    |
| 3. | Koordinasi dan Pemantauan Layanan Pengadilan Wilayah Tengah |                    |    |     |    | kegiatan              | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1053-Peningkatan Manajemen Peradilan Agama                                                     | Rp1.932.405.000  |
| 4. | Koordinasi dan Pemantauan Layanan Pengadilan Wilayah Timur  |                    |    |     |    | kegiatan              | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1053-Peningkatan Manajemen Peradilan Agama                                                     | Rp641.400.000    |
| 5. | Koordinasi Pengelolaan PNPB                                 |                    |    |     |    | kegiatan              | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1053-Peningkatan Manajemen Peradilan Agama                                                     | Rp4.684.635.000  |
| 6. | Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama     |                    |    |     |    | Orang                 | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1053-Peningkatan Manajemen Peradilan Agama                                                     | Rp22.607.700.000 |
| 7. | Naskah Kesyarifan                                           |                    |    |     |    | Rekomendasi Kebijakan | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1056 - Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) serta Kesyarifan | Rp496.776.000    |

## 3. BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA

| NO | AKSI/KEGIATAN                                    | JADWAL PELAKSANAAN |    |     |    | KELUARAN | PROGRAM                               | KEGIATAN                                     | DANA      |
|----|--------------------------------------------------|--------------------|----|-----|----|----------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
|    |                                                  | I                  | II | III | IV |          |                                       |                                              |           |
| 1. | Monitoring Kebijakan Pelayanan Peradilan Militer |                    |    |     |    | Kegiatan | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1058-Peningkatan Manajemen Peradilan Militer | Rp277.000 |



|    |                                                                                                           |  |  |  |  |  |          |                                       |                                                          |                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| 2. | Pengawasan dan Pengamatan Lembaga Pemasyarakatan Militer                                                  |  |  |  |  |  | Kegiatan | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1058-Peningkatan Manajemen Peradilan Militer             | Rp380.600.000   |
| 3. | Bimbingan Teknis Kompetensi Penyelesaian Perkara                                                          |  |  |  |  |  | Orang    | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1058-Peningkatan Manajemen Peradilan Militer             | Rp758.966.000   |
| 4. | Bimbingan Teknis tentang Perempuan yang berhadapan dengan Hukum di Lingkungan Peradilan Militer           |  |  |  |  |  | Orang    | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1058-Peningkatan Manajemen Peradilan Militer             | Rp250.000.000   |
| 5. | Monitoring Kebijakan Pelayanan Peradilan Tata Usaha Negara                                                |  |  |  |  |  | Kegiatan | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1059 - Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara | Rp479.930.000   |
| 6. | Dukungan Penyelesaian Perkara                                                                             |  |  |  |  |  | Kegiatan | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1059 - Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara | Rp303.755.000   |
| 7. | Bimbingan Teknis Kompetensi Penyelesaian Perkara                                                          |  |  |  |  |  | Kegiatan | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1059 - Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara | Rp1.063.630.000 |
| 8. | Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara                                       |  |  |  |  |  | Orang    | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1059 - Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara | Rp1.122.800.000 |
| 9. | Bimbingan Teknis tentang Perempuan yang berhadapan dengan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara |  |  |  |  |  | Orang    | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1059 - Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara | Rp350.000.000   |

#### 4. Badan Pengawasan

| NO | AKSI/KEGIATAN          | JADWAL PELAKSANAAN |    |     |    | KELUARAN | PROGRAM                    | KEGIATAN                                                                                                                               | DANA             |
|----|------------------------|--------------------|----|-----|----|----------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |                        | I                  | II | III | IV |          |                            |                                                                                                                                        |                  |
| 1. | Layanan Audit Internal |                    |    |     |    | Laporan  | Program Dukungan Manajemen | 1077 - Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah I, II, III, IV | Rp30.435.648.000 |



## RENCANA AKSI TAHUN 2025

### MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

| No | Sasaran Strategis                                               | Indikator Kinerja                                  | Target |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|
| 3  | Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional | 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 73     |
|    |                                                                 | 2. Nilai Kinerja Anggaran                          | 90     |
|    |                                                                 | 3. Nilai Sistem Merit                              | 203    |
|    |                                                                 | 4. Indeks Pengelolaan Aset                         | 3,75   |
|    |                                                                 | 5. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional         | 94     |
|    |                                                                 | 6. Predikat Opini Laporan Keuangan                 | WTP    |

#### 1. Kepaniteraan

| NO | AKSI/KEGIATAN                               | JADWAL PELAKSANAAN |    |     |    | KELUARAN | PROGRAM                    | KEGIATAN                                                           | DANA              |
|----|---------------------------------------------|--------------------|----|-----|----|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    |                                             | I                  | II | III | IV |          |                            |                                                                    |                   |
| 1. | Layanan BMN                                 |                    |    |     |    | Layanan  | Program Dukungan Manajemen | 6242 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan | Rp200.000.000     |
| 2. | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal |                    |    |     |    | Layanan  | Program Dukungan Manajemen | 6242 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan | Rp7.360.843.000   |
| 3. | Layanan Perkantoran                         |                    |    |     |    | Layanan  | Program Dukungan Manajemen | 6242 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan | Rp193.168.457.000 |
| 4. | Layanan Manajemen SDM                       |                    |    |     |    | Orang    | Program Dukungan Manajemen | 6242 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan | Rp1.775.292.000   |
| 5. | Layanan Manajemen Keuangan                  |                    |    |     |    | Laporan  | Program Dukungan Manajemen | 6242 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan | Rp833.092.000     |
| 6. | Layanan Sarana Internal                     |                    |    |     |    | Unit     | Program Dukungan Manajemen | 6242 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan | Rp1.223.474.000   |



## 2. BADAN PERADILAN UMUM

| NO | AKSI/KEGIATAN                               | JADWAL PELAKSANAAN |    |     |    | KELUARAN | PROGRAM                    | KEGIATAN                                                                          | DANA             |
|----|---------------------------------------------|--------------------|----|-----|----|----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |                                             | I                  | II | III | IV |          |                            |                                                                                   |                  |
| 1. | Layanan BMN                                 |                    |    |     |    | Layanan  | Program Dukungan Manajemen | 6243 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum | Rp1.100.000      |
| 2. | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal |                    |    |     |    | Layanan  | Program Dukungan Manajemen | 6243 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum | Rp2. 885.079.000 |
| 3. | Layanan Umum                                |                    |    |     |    | Layanan  | Program Dukungan Manajemen | 6243 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum | Rp5.783.621.000  |
| 4. | Layanan Perkantoran                         |                    |    |     |    | Layanan  | Program Dukungan Manajemen | 6243 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum | Rp33.396.429.000 |
| 5. | Layanan Data dan Informasi                  |                    |    |     |    | Dokumen  | Program Dukungan Manajemen | 6243 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum | Rp1.650.106.000  |

## 3. BADAN PERADILAN AGAMA

| NO | AKSI/KEGIATAN                               | JADWAL PELAKSANAAN |    |     |    | KELUARAN | PROGRAM                    | KEGIATAN                                                                                     | DANA            |
|----|---------------------------------------------|--------------------|----|-----|----|----------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|    |                                             | I                  | II | III | IV |          |                            |                                                                                              |                 |
| 1. | Layanan BMN                                 |                    |    |     |    | Layanan  | Program Dukungan Manajemen | 6244 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag) | Rp139.000.000   |
| 2. | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal |                    |    |     |    | Layanan  | Program Dukungan Manajemen | 6244 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag) | Rp2.254.067.000 |
| 3. | Layanan Umum                                |                    |    |     |    | Layanan  | Program Dukungan Manajemen | 6244 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag) | Rp140.175.000   |
| 4. | Layanan Data dan Informasi                  |                    |    |     |    | Layanan  | Program Dukungan Manajemen | 6244 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag) | Rp1.367.029.000 |



|    |                     |  |  |  |  |  |         |                            |                                                                                              |                  |
|----|---------------------|--|--|--|--|--|---------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 5. | Layanan Perkantoran |  |  |  |  |  | Layanan | Program Dukungan Manajemen | 6244 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag) | Rp31.315.645.000 |
|----|---------------------|--|--|--|--|--|---------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

#### 4. BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA

| NO | AKSI/KEGIATAN                               | JADWAL PELAKSANAAN |    |     |    | KELUARAN | PROGRAM                    | KEGIATAN                                                                                                                   | DANA             |
|----|---------------------------------------------|--------------------|----|-----|----|----------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |                                             | I                  | II | III | IV |          |                            |                                                                                                                            |                  |
| 1. | Layanan BMN                                 |                    |    |     |    | Layanan  | Program Dukungan Manajemen | 6245 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Badilimilitun) | Rp8.340.000      |
| 2. | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal |                    |    |     |    | Layanan  | Program Dukungan Manajemen | 6245 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Badilimilitun) | Rp1.433.556.000  |
| 3. | Layanan Data dan Informasi                  |                    |    |     |    | Layanan  | Program Dukungan Manajemen | 6245 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Badilimilitun) | Rp874.099.000    |
| 4. | Layanan Perkantoran                         |                    |    |     |    | Layanan  | Program Dukungan Manajemen | 6245 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Badilimilitun) | Rp15.150.438.000 |

#### 5. BADAN STRATEGI DAN PELATIHAN DAN PENDIDIKAN HUKUM DAN PERADILAN

| NO | AKSI/KEGIATAN | JADWAL PELAKSANAAN |    |     |    | KELUARAN | PROGRAM                    | KEGIATAN                                                                                                                             | DANA            |
|----|---------------|--------------------|----|-----|----|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|    |               | I                  | II | III | IV |          |                            |                                                                                                                                      |                 |
| 1. | Layanan Umum  |                    |    |     |    | Layanan  | Program Dukungan Manajemen | 1075 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan | Rp4.629.595.000 |



|    |                                             |  |  |  |  |  |  |         |                            |                                                                                                                                      |                  |
|----|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2. | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal |  |  |  |  |  |  | Layanan | Program Dukungan Manajemen | 1075 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan | Rp1.145.564.000  |
| 3. | Layanan Data dan Informasi                  |  |  |  |  |  |  | Layanan | Program Dukungan Manajemen | 1075 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan | Rp742.638.000    |
| 4. | Layanan Perkantoran                         |  |  |  |  |  |  | Layanan | Program Dukungan Manajemen | 1075 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan | Rp50.069.762.000 |

## 6. BADAN PENGAWASAN

| NO | AKSI/KEGIATAN                               | JADWAL PELAKSANAAN |    |     |    | KELUARAN | PROGRAM                    | KEGIATAN                                                                              | DANA             |
|----|---------------------------------------------|--------------------|----|-----|----|----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |                                             | I                  | II | III | IV |          |                            |                                                                                       |                  |
| 1. | Layanan Umum                                |                    |    |     |    | Layanan  | Program Dukungan Manajemen | 1079 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung | Rp512.654.000    |
| 2. | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal |                    |    |     |    | Layanan  | Program Dukungan Manajemen | 1079 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung | Rp476.901.000    |
| 3. | Layanan Data dan Informasi                  |                    |    |     |    | Layanan  | Program Dukungan Manajemen | 1079 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung | Rp298.250.000    |
| 4. | Layanan Perkantoran                         |                    |    |     |    | Layanan  | Program Dukungan Manajemen | 1079 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung | Rp47.060.355.000 |



## 7. BADAN URUSAN ADMINISTRASI

| NO | AKSI/KEGIATAN                             | JADWAL PELAKSANAAN |    |     |    | KELUARAN          | PROGRAM                    | KEGIATAN                                                                                             | DANA                |
|----|-------------------------------------------|--------------------|----|-----|----|-------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                                           | I                  | II | III | IV |                   |                            |                                                                                                      |                     |
| 1. | Layanan Perkantoran                       |                    |    |     |    | Layanan           | Program Dukungan Manajemen | 1064 - Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan | Rp15.530.795.000    |
| 2. | Layanan Hukum                             |                    |    |     |    | Layanan           | Program Dukungan Manajemen | 1064 - Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan | Rp16.787.996.000    |
| 3. | Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi |                    |    |     |    | Layanan           | Program Dukungan Manajemen | 1064 - Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan | Rp425.800.000       |
| 4. | Layanan Data dan Informasi                |                    |    |     |    | Layanan           | Program Dukungan Manajemen | 1064 - Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan | Rp3.000.287.000     |
| 5. | Penyusunan Pedoman Peradilan              |                    |    |     |    | Rancangan Standar | Program Dukungan Manajemen | 1064 - Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan | Rp500.000.000       |
| 6. | Pengembangan Sistem Penanganan Perkara    |                    |    |     |    | Layanan           | Program Dukungan Manajemen | 1064 - Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan | Rp6.000.000.000     |
| 7. | Layanan Manajemen SDM                     |                    |    |     |    | Orang             | Program Dukungan Manajemen | 1065 - Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM                           | Rp19.734.385.000    |
| 8. | Layanan Perkantoran                       |                    |    |     |    | Layanan           | Program Dukungan Manajemen | 1066 - Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi                     | Rp4.122.142.962.000 |



|     |                                                                     |  |  |  |  |  |  |                   |                            |                                                                                                                                                      |                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 9.  | Layanan Manajemen Keuangan                                          |  |  |  |  |  |  | Dokumen           | Program Dukungan Manajemen | 1066 - Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi                                                                     | Rp34.327.994.000 |
| 10. | Layanan Perencanaan dan Penganggaran                                |  |  |  |  |  |  | Dokumen           | Program Dukungan Manajemen | 1067 - Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran serta Penataan Organisasi Mahkamah Agung                                                      | Rp5.331.481.000  |
| 11. | Layanan Pemantauan dan Evaluasi                                     |  |  |  |  |  |  | Dokumen           | Program Dukungan Manajemen | 1067 - Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran serta Penataan Organisasi Mahkamah Agung                                                      | Rp1.360.772.000  |
| 12. | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal                         |  |  |  |  |  |  | Layanan           | Program Dukungan Manajemen | 1067 - Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran serta Penataan Organisasi Mahkamah Agung                                                      | Rp8.861.069.000  |
| 13. | Penyusunan Rancangan Kebijakan Penguatan Kelembagaan Mahkamah Agung |  |  |  |  |  |  | Rancangan Standar | Program Dukungan Manajemen | 1067 - Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran serta Penataan Organisasi Mahkamah Agung                                                      | Rp1.500.000.000  |
| 14. | Layanan Data dan Informasi                                          |  |  |  |  |  |  | Layanan           | Program Dukungan Manajemen | 1068 - Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya | Rp3.703.416.000  |
| 15. | Layanan Manajemen Keuangan                                          |  |  |  |  |  |  | Layanan           | Program Dukungan Manajemen | 1068 - Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya | Rp1.822.422.000  |
| 16. | Layanan Perkantoran                                                 |  |  |  |  |  |  | Layanan           | Program Dukungan Manajemen | 1069 - Dukungan Pelayanan Pimpinan Mahkamah Agung dan Tugas Teknis Lainnya                                                                           | Rp5.700.000.000  |
| 17. | Layanan Umum                                                        |  |  |  |  |  |  | Layanan           | Program Dukungan Manajemen | 1069 - Dukungan Pelayanan Pimpinan Mahkamah Agung dan Tugas Teknis Lainnya                                                                           | Rp14.102.937.000 |



|     |                                 |  |  |  |  |  |  |         |                            |                                                                                                                        |                     |
|-----|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 18. | Layanan Perkantoran             |  |  |  |  |  |  | Layanan | Program Dukungan Manajemen | 1070 - Pelaksanaan Pembinaan Keamanan, Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Bina Sikap Mental di Lingkungan Mahkamah Agung | Rp210.367.587.000   |
| 19. | Layanan Umum                    |  |  |  |  |  |  | Layanan | Program Dukungan Manajemen | 1070 - Pelaksanaan Pembinaan Keamanan, Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Bina Sikap Mental di Lingkungan Mahkamah Agung | Rp930.060.000       |
| 20. | Layanan Sarana Internal         |  |  |  |  |  |  | Unit    | Program Dukungan Manajemen | 1071 - Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung                                                     | Rp147.974.000.000   |
| 21. | Layanan Prasarana Internal      |  |  |  |  |  |  | M2      | Program Dukungan Manajemen | 1071 - Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung                                                     | Rp73.279.500.000    |
| 22. | Layanan Umum                    |  |  |  |  |  |  | Rupiah  | Program Dukungan Manajemen | 6986 - Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilatan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama                | Rp1.390.770.000     |
| 23. | Layanan Perkantoran             |  |  |  |  |  |  | Rupiah  | Program Dukungan Manajemen | 6986 - Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilatan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama                | Rp6.183.724.871.000 |
| 24. | Layanan Pemantauan dan Evaluasi |  |  |  |  |  |  | Dokumen | Program Dukungan Manajemen | 6986 - Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilatan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama                | Rp276.856.000       |

Sumber data: Aplikasi KRISNA – RENSTRAKL 2025 - 2029 <https://ma.kl.krisna.systems/renstrakl/2025-2029/renstrakl-v2-main>

Jakarta, 25 November 2025

Sekretaris Mahkamah Agung  
Republik Indonesia



Sugiyanto